Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (2) 2026, Page: 24335-24341

Analisis Penerapan *E-Budgeting* dalam Proses Penganggaran Pemerintah Kota Surakarta

Sita Kirana Azahra[1*], Vera Putri Naveza[2], Revienda Anita Fitrie[3], Eva Hany Fanida[4]
Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya
Corresponding author e-mail: 25040674071@mhs.unesa.ac.id, 25040674046@mhs.unesa.ac.id, reviendafitrie@unesa.ac.id, evafanida@unesa.ac.id

Published: May , 2026

ABSTRACT

One of the improvements in a strong financial governance system is the use of e-budgeting in financial transparency. Since 2017, the Surakarta City Government has implemented e-budgeting services. This study seeks to describe how e-budgeting supports budget transparency in the Surakarta City Government. The findings of this study indicate that E-Budgeting is very important in improving budget transparency in the Surakarta City Government. The Surakarta City Government implements budget transparency services, including e-budget.surakarta.go.id and ppid.surakarta.go.id. The findings of the study indicate that the implementation of e-budgeting plays a crucial role in providing transparent, easily accessible, and accountable budget data to the public. In addition, the Surakarta City administration offers ULAS services as support for public aspirations and complaints. The award issued by the Supreme Audit Agency with the label Not Qualified for twelve consecutive times demonstrates the success of the Surakarta City Government in good financial management. This article recommends the importance of increasing intensive outreach programs to the community to increase their involvement and active participation in monitoring the budgeting process of the Surakarta City Government.

Keywords: *E-Budgeting, Budget Transparency, Financial Governance*

ABSTRAK

Salah satu peningkatan dalam sistem tata kelola keuangan yang kuat adalah penggunaan E-Penganggaran dalam transparansi keuangan. Sejak tahun 2017, Pemerintah Kota Surakarta telah menerapkan layanan *E-Budgeting*. Studi ini berupaya untuk menggambarkan bagaimana *E-Budgeting* mendukung transparansi anggaran di Pemerintah Kota Surakarta. Temuan studi ini menunjukkan bahwa *E-Budgeting* sangat penting dalam meningkatkan transparansi anggaran di Pemerintah Kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta menerapkan layanan transparansi anggaran, termasuk *e-budget.surakarta.go.id* dan *ppid.surakarta.go.id*. Temuan studi menunjukkan bahwa implementasi *E-budgeting* memainkan peran krusial dalam menyediakan data anggaran yang transparan, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selain itu, administrasi Kota Surakarta menawarkan layanan ULAS sebagai dukungan untuk aspirasi dan keluhan masyarakat. Penghargaan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Tertinggi dengan label Tidak Memenuhi Syarat selama dua belas kali berturut-turut menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kota Surakarta dalam manajemen keuangan yang baik. Artikel ini merekomendasikan pentingnya peningkatan program sosialisasi yang intensif kepada masyarakat untuk meningkatkan keterlibatan dan partisipasi aktif mereka dalam pengawasan terhadap proses penganggaran Pemerintah Kota Surakarta.

Kata Kunci: *E-Budgeting*, Transparansi Anggaran, Tata Kelola Keuangan

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong terjadinya transformasi dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Digitalisasi sistem administrasi publik menjadi salah satu strategi utama untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam proses penganggaran. Salah satu inovasi yang banyak diterapkan oleh pemerintah daerah di Indonesia adalah sistem *Electronic Budgeting* (*E-Budgeting*), yaitu mekanisme penyusunan, pengelolaan, dan pengawasan anggaran berbasis teknologi informasi.

E-Budgeting atau *Electronic Budgeting* adalah sebuah sistem pengelolaan anggaranyang memanfaatkan teknologi informasi untuk mendigitalisasi seluruh proses perencanaan, pengajuan, pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran pemerintah. Konsep utama dari *e-budgeting* adalah

menciptakan sistem penganggaran yang efisien, transparan, dan akuntabel, di mana setiap tahapan anggaran tercatat secara elektronik dan dapat dilacak *(audit trail)* oleh berbagai pemangku kepentingan (Natta Sanjaya et al, 2025). Sistem mampu mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk proses penganggaran karena dilakukan secara *online* dan dapat diakses dimana saja, namun efisiensi waktu dapat tercapai jika penggunaan sistem dapat dilakukan dengan benar oleh penggunanya. Pada praktiknya, *e-budgeting* mengintegrasikan proses dari berbagai unit kerja dalam satu sistem terpadu. Usulan kegiatan dari masing-masing unit dimasukkan ke dalam sistem secara daring, lalu dilakukan validasi secara otomatis oleh perencana, sehingga mempercepat alur birokrasi dan mengurangi potensi manipulasi data. Keunggulan *e-budgeting* terletak pada kemampuannya untuk menyimpan seluruh riwayat keputusan anggaran secara digital, yang memudahkan proses evaluasi dan audit, baik oleh internal pemerintah maupun oleh masyarakat umum. Secara normatif, penerapan *e-budgeting* juga telah memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua regulasi tersebut mewajibkan pengelolaan anggaran yang transparan dan berbasis sistem informasi. Oleh karena itu, dalam tataran konseptual, *e-budgeting* bukan hanya alat bantu teknis, tetapi juga representasi dari komitmen negara terhadap *good governance*, penguatan pengawasan publik, dan pencapaian efisiensi fiskal (Zahri & Kusumastuti, 2020)

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan prinsip *good governance*, penerapan *e-budgeting* di tingkat pemerintah daerah diharapkan mampu meminimalkan praktik maladministrasi, mempercepat proses perencanaan anggaran, serta meningkatkan partisipasi dan pengawasan publik. Dalam konteks ini, Surakarta menjadi salah satu kota yang mengimplementasikan sistem *e-budgeting* dalam proses penganggaran daerahnya. Penerapan sistem ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota untuk memperkuat transparansi fiskal dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui tata kelola keuangan yang lebih modern dan terintegrasi.

Namun demikian, efektivitas penerapan *e-budgeting* tidak hanya diukur dari keberadaan sistem digital semata, melainkan juga dari sejauh mana sistem tersebut mampu meningkatkan efisiensi waktu, akurasi perencanaan, pengendalian anggaran, serta mencegah penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, faktor sumber daya manusia, kesiapan infrastruktur teknologi, serta budaya birokrasi turut memengaruhi keberhasilan implementasinya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan *e-budgeting* dalam proses penganggaran Pemerintah Kota Surakarta, dengan meninjau aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana digitalisasi penganggaran mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik. Di sisi lain, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan anggaran melalui forum seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) juga perlu terus diperkuat. Dengan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan, pemerintah dapat menyusun anggaran yang lebih relevan dengan kebutuhan dan harapan publik.

Salah satu inovasi *good governance* dan contoh pemanfaatan teknologi informasi, penggunaan program komputer berbasis *web* untuk mengefektifkan penyusunan APBD saat ini sedang dilaksanakan. Hal ini penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan dalam pengelolaan anggaran daerah, atau bisa juga berarti penganggaran elektronik, yang merupakan metode populer untuk melacak uang. Surakarta merupakan salah satu kota yang sedang berproses menjadi *Smart City* dengan menerapkan teknologi yang semakin maju, seperti aplikasi *Solo Destination*. Saat ini, Surakarta merupakan salah satu kota yang menggunakan *e-budgeting* untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap belanja pemerintah dengan membuat belanja lebih transparan. *Website* ini dikelola oleh Badan Litbang Daerah, Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika, dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta. Ini merupakan langkah awal untuk memfasilitasi open data di instansi pemerintah yang responsif dan akuntabel. (Nasehati, 2022)

Dalam pelaksanaannya pemerintah sudah mengupayakan atau mempunyai kemauan untuk mensukseskan implementasi *e-budgeting* di semua tingkatan pemerintah . Salah satu pemerintah daerah yang mengimplementasi *e-budgeting* adalah pemerintah kota Surakarta, dimana pemerintah Surakarta baru menjalankan sistem selama dua tahun tetapi telah memperoleh peringkat ke-5, berdasarkan hasil

evaluasi dan monitoring terhadap 36 pemerintah daerah di Jateng yang dilakukan komisi pemberantasan korupsi (KPK) pada tahun 2017. Pada tahun 2018 pemerintah kota Surakarta memperoleh pencapaian sebagai badan publik informatif peringkat ke-3 tingkat provinsi Jawa Tengah setelah kota Batang dalam penerapan sistem *e-budgeting* dan sistem pemerintahan yang lain (Laporan tahunan PPID kota Surakarta, 2018). Hal ini disimpulkan bahwa pemerintah kota Surakarta belum secara maksimal dalam mengembangkan sistem informasi didalam pemerintahannya, dikarenakan masih belum bisa mendapatkan peringkat terbaik di Provinsi Jawa Tengah. (Zahri & Kusumastuti, 2020)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Surakarta, dengan fokus pada instansi yang terlibat langsung dalam pelaksanaan e-budgeting. Yaitu BPPKAD, Bappeda dan Diskominfo SP. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi pada situs website pemerintah kota surakarta dan studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi *E-Budgeting* Pada Pemerintah Kota Surakarta

Berdasarkan Laporan Kegiatan Penyerahan DPPA APBD 2024 yang dibacakan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Surakarta dan Sekretaris Daerah Kota Surakarta, jumlah APBD Perubahan 2024 mencapai Rp 2,3 triliun.

Uraian	Anggaran (Rp)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	893.186.133.981,00
Pajak Daerah	565.350.000.000,00
Retribusi Daerah	85.602.913.011,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.905.378.622,00
Lain lain PAD yang Sah	223.327.842.348,00
PENDAPATAN TRANSFER	1.421.733.029.022,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.224.171.995.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	197.561.034.022,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.560.000.000,00
Pendapatan Hibah	6.560.000.000,00
Jumlah Pendapatan	2.321.479.163.003,00

Sumber: radar.solo jawapos.com

Rinciannya ialah Pertama dari pos anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 893,1 miliar yang terdiri dari Pajak Daerah Rp 565,3 miliar dan Retribusi Daerah Rp 85,6 miliar. Lalu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 18,9 miliar, lain-lain PAD yang sah Rp 223,3 miliar. Kedua dari pos anggaran Pendapatan Transfer Rp 1,4 triliun yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp 1,2 triliun dan Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp 197,5 miliar. Sementara pos anggaran yang ketiga adalah Pendapatan Daerah Yang Sah (pendapatan hibah) senilai Rp 6,5 miliar. Dengan demikian total pendapatan daerah di APBD Perubahan 2024 mencapai Rp 2,3 triliun.

Implementasi *e-budgeting* di Pemerintah Kota Surakarta dapat dilihat dari transparansi dan struktur pengelolaan APBD tahun 2024. Berdasarkan data yang diperoleh, total APBD Perubahan mencapai sekitar Rp2,3 triliun dengan komposisi utama berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

Penggunaan sistem *e-budgeting* memungkinkan proses penyusunan anggaran dilakukan secara lebih sistematis, terintegrasi, dan dapat dipantau secara *real-time*. Hal ini terlihat dari rincian pendapatan daerah yang tersusun secara jelas, seperti pajak daerah, retribusi, serta lain-lain PAD yang sah. Selain itu, *e-budgeting* juga meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah, karena setiap alokasi anggaran dapat ditelusuri dan diawasi. Dengan adanya sistem ini, potensi kesalahan perencanaan maupun penyalahgunaan anggaran dapat diminimalisir.

Perbedaan Sebelum dan Sesudah Implementasi *E-Budgeting*

Transparansi harus dikedepankan oleh otoritas publik yang bertanggung jawab untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam menjalankan pemerintahan. Maka dari itu, dalam menunjukkan komitmennya sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Pemerintah Kota Surakarta terus berupaya terhadap Keterbukaan Informasi Publik dengan menerapkan *e-budgeting*. Perbedaan-perbedaan ini dapat dilihat sebagai berikut.

Sejalan dengan kemajuan teknologi dan dinamika globalisasi, pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah. Sebelum implementasi *e-budgeting*, proses perencanaan, penyusunan anggaran, dan pelaporan masih dilakukan secara konvensional, sehingga dianggap kurang optimal dalam hal efektivitas dan efisiensi.

Melalui implementasi *e-budgeting*, masyarakat dapat mengakses dan memantau penggunaan anggaran secara lebih transparan, yang telah menghasilkan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, khususnya terkait pelaksanaan anggaran. Sistem ini juga mendorong pejabat pemerintah untuk bekerja lebih transparan dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

Sebelumnya, mekanisme penyusunan anggaran manual relatif memakan waktu, mahal, dan lambat, sehingga mengakibatkan pelaksanaan anggaran yang kurang optimal. Dengan sistem terintegrasi yang mencakup tahap perencanaan, penganggaran, dan pelaporan, *e-budgeting* dapat menghemat waktu dan biaya persiapan. Secara keseluruhan, implementasi sistem ini telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran pemerintah.

***E-Budgeting* Terhadap Transparansi Kota Surakarta**

Pemerintah Kota Surakarta mengutamakan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem penganggaran elektronik *(e-budgeting)* semakin memperkuat komitmen ini dengan menekankan transparansi keuangan di tingkat daerah. Pemerintah Kota Surakarta telah menerapkan e-budgeting dan memperoleh pengakuan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selama sepuluh tahun berturut-turut melalui predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penghargaan ini layak dibanggakan karena mencerminkan pengelolaan pemerintahan yang transparan, jujur, dan bahkan bebas dari korupsi.

Pemerintah Kota Surakarta juga telah menerapkan petunjuk teknis pelaksanaan tahapan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), mencakup persiapan, narasumber, fasilitas, pendampingan, peserta, delegasi, hingga mekanismenya. Hal ini didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 mengenai Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Walikota Surakarta Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 mengenai Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Kota Surakarta. Dengan semangat reformasi, kebijakan ini bertujuan menciptakan perencanaan partisipatif di tingkat lokal. Melalui musrenbang tahunan yang diselenggarakan Bappeda, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dengan membahas isu-isu utama, menyuarakan keprihatinan, serta menentukan prioritas proyek pembangunan yang akan didanai.

Rekapitulasi Kehadiran Peserta Musrenbang RKPD Tahun 2020 Kota Surakarta

UNSUR	JUMLAH UNDANGAN	JUMLAH KEHADIRAN
Pimpinan Pemerintah Kota	9	9
Muspida	5	2
DPRD	45	45
Provinsi	2	1
Bupati Wilayah Sekitar	3	3
Delegasi Musrenbangcam	55	46
Delegasi DKT	88	57

Perangkat Daerah	45	45
LSM	6	5
Perguruan Tinggi	4	1
Organisasi Masyarakat dan Pemuda	9	5
Komunitas Sektoral	6	3
Tokoh Agama	7	3
Budayawan	5	3
LPMK	54	40
Organisasi Profesi	6	3
Organisasi Perempuan	2	1
Perwakilan Partai Politik	6	1
TPKK	5	2
TKSK	50	21
Koordinator Kotaku	1	1
Perwakilan Fasilitator Kelurahan	8	6
Forum Anak	6	6
Instansi Vertikal	7	3
TP PKK	6	4
Pelaku Usaha	13	13
Pers	2	2
Tokoh Masyarakat	7	7
Koordinator Kotaku	1	2
Total	**463**	**340**
Presentase Kehadiran		**73,43%**

Sumber: Website Resmi Bappeda

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa tingkat kehadiran sebesar 73,43%. Salah satu bentuk nyata transparansinya adalah tersedianya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Secara umum, Pemerintah Kota Surakarta menyediakan berbagai website transparansi yang dapat diakses publik guna memantau anggaran APBD daerah Kota Surakarta.

1. *Website* https://e-budget.surakarta.go.id/web/

   Informasi anggaran tersedia secara terbuka kepada publik melalui sistem penganggaran berbasis online, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses data keuangan daerah melalui website tersebut. *Website* ini memuat berbagai informasi pada tahap perencanaan anggaran, mulai dari data Musrenbang, Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perencanaan KUA/PPAS, penetapan kinerja, perubahan KUA/PPAS, evaluasi hasil Renja, hingga perbandingan antara KUA/PPAS dan anggaran yang telah ditetapkan sampai pada pagu perubahan. Pada fitur perbandingan KUA/PPAS dan anggaran penetapan, juga tersedia rincian anggaran masing-masing OPD secara lengkap, termasuk rencana program, kegiatan, serta alokasi belanja. Keberadaan sistem ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh akses terhadap informasi anggaran daerah.

   Menurut *United Nations Development Programme* dalam Adisasmita (2011:24), transparansi sebagai salah satu prinsip *good governance* diwujudkan melalui keterbukaan arus informasi yang dapat diakses langsung oleh pihak yang membutuhkan, serta disajikan secara sederhana agar mudah dipahami dan ditelusuri. Dalam konteks ini, *e-budgeting* berperan penting dalam mendukung keterbukaan informasi anggaran agar dapat diakses secara luas oleh masyarakat, khususnya warga Kota Surakarta. Secara umum, tampilan *website* dinilai cukup sederhana, jelas, dan mudah dipahami, sehingga memudahkan pengguna dalam mengakses informasi yang tersedia.

   Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kekurangan dalam penyajian data. Tidak semua informasi ditampilkan secara lengkap, seperti pada data Musrenbang tingkat kelurahan

tahun 2017 yang tidak memuat informasi (bernilai nol), sementara data pada tahun 2018, 2019, dan 2020 telah disajikan dengan jelas. Selain itu, walaupun website ini ditujukan untuk masyarakat luas, masih terdapat kendala berupa keterbatasan literasi teknologi pada sebagian masyarakat akibat rendahnya tingkat pendidikan, yang dapat menghambat pemanfaatan informasi secara optimal.

2. *Website* ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta*)* https://ulas.surakarta.go.id/

Aplikasi Solo Destination dilengkapi dengan fitur ULAS sebagai sarana komunikasi antara masyarakat dan Pemerintah Kota Surakarta. Melalui fitur ini, warga dapat dengan mudah menyampaikan aspirasi, kritik, saran, maupun keluhan kepada pemerintah daerah. ULAS menyediakan sekitar 55 kategori pengaduan yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Berdasarkan data yang tersedia, tercatat sebanyak 2.786 laporan telah masuk, dan 2.781 di antaranya telah mendapatkan tanggapan, yang menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan ini.

Fitur ULAS memungkinkan masyarakat untuk melaporkan berbagai permasalahan secara online dengan melampirkan foto serta mencantumkan lokasi kejadian secara akurat. Setiap laporan kemudian akan ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan standar waktu respons maksimal tiga kali 24 jam. Dengan demikian, fitur ini dapat dikatakan sebagai inovasi layanan publik yang sangat dibutuhkan karena mempermudah proses penyampaian pengaduan dan meningkatkan responsivitas pemerintah.

Namun, pemanfaatan fitur ULAS masih menghadapi sejumlah kendala. Tidak seluruh masyarakat Kota Surakarta memiliki akses terhadap *smartphone,* dan tidak semua pengguna *smartphone t*elah mengunduh aplikasi *Solo Destination*. Keterbatasan ini kemungkinan disebabkan oleh faktor ekonomi dan keterbatasan sumber daya pada sebagian masyarakat, sehingga belum semua warga dapat memanfaatkan layanan tersebut secara optimal.

3. *Website* https://ppid.surakarta.go.id/

Dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kota Surakarta menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat dalam memperoleh serta memanfaatkan informasi publik yang tersedia. Melalui keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), masyarakat dapat dengan mudah dan cepat mengajukan permohonan informasi, khususnya terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah disahkan, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas bagaimana anggaran daerah digunakan oleh pemerintah.

Upaya transparansi tersebut juga didukung melalui berbagai platform digital milik Pemerintah Kota Surakarta. *Website e-budgeting.surakarta.go.id* digunakan untuk mempublikasikan informasi anggaran beserta realisasinya, sehingga masyarakat dapat memantau pengelolaan keuangan daerah secara terbuka. Sementara itu, fitur ULAS dalam aplikasi *Solo Destination* menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun gagasan kepada pemerintah. Sementara itu, PPID Kota Surakarta menyediakan akses terhadap dokumen keuangan resmi yang telah disahkan. Seluruh platform ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surakarta berupaya mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya melalui penerapan *e-budgeting*. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan prinsip *good governance*, seperti transparansi, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat.

Implementasi *e-budgeting* di Kota Surakarta didukung oleh sistem Simda Terpadu yang dikelola oleh BPPKAD, Bappeda, serta Diskominfo SP. Penyampaian kebijakan dan program kegiatan secara langsung kepada masyarakat menunjukkan adanya komunikasi yang terbangun antara organisasi perangkat daerah dengan pemerintah dan masyarakat. Dari sisi sumber daya manusia, pelaksanaan e-budgeting menjadi tanggung jawab masing-masing OPD, meskipun masih terdapat keterbatasan karena struktur SDM yang bersifat umum. Namun demikian, pengetahuan serta komitmen para pelaksana kebijakan dan birokrasi menjadi faktor penting

dalam mendukung keberhasilan implementasi sistem ini. Secara keseluruhan, penerapan *e-budgeting* mendorong terwujudnya sistem berbasis *website* yang bertujuan meningkatkan keterbukaan pemerintah kepada masyarakat luas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, penerapan *e-budgeting* di Pemerintah Kota Surakarta terbukti memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Sistem ini memungkinkan proses penganggaran dilakukan secara terintegrasi, sistematis, dan dapat dipantau secara *real-time*, sehingga meminimalkan potensi kesalahan maupun penyimpangan anggaran.

Keberadaan berbagai *platform digital* seperti *website e-budgeting*, PPID, serta layanan ULAS turut memperkuat keterbukaan informasi publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi serta memberikan masukan terhadap kebijakan anggaran. Hal ini berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

Meskipun demikian, implementasi *e-budgeting* masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan literasi teknologi masyarakat, belum meratanya akses terhadap perangkat digital, serta belum optimalnya penyajian data pada beberapa fitur. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan sosialisasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyempurnaan sistem agar pemanfaatannya dapat lebih optimal.

Secara keseluruhan, penerapan *e-budgeting* di Kota Surakarta telah mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan prinsip *good governance*, khususnya dalam aspek transparansi, efisiensi, dan partisipasi publik dalam pengelolaan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Nasehati, A. (2022). Implementasi E-Budgeting Dalam mendukung transparansi pada pemerintahan kota surakarta. *Ilmiyah Manajemen Dan Kewirausahaan*, *2*(2), 134–140.

Surakarta, P. K. (2018). *Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (ppid) pemerintah kota surakarta tahun 2018 pemerintah kota surakarta*.

Zahri, R. M., & Kusumastuti, D. A. (2020). The determinant of user perspective, satisfaction, and e-budgeting success in Surakarta Municipality. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, *4*(1), 240–253.

S. Kurniawan, Pemkot Surakarta Serahkan DPPA APBD 2024 Kepada 37 OPD Senilai Rp 2,3 Triliun (2024).

Rahma, A. N., & Rani, U. (2023). *Peran e-budgeting untuk mendukung transparansi anggaran pada Pemerintah Kota Surakarta*. Jurnal Akuntansi Kompetif, 6(1), 64–70.

Sanjaya, N., Dewi, H. F. S., Putri, S. S., Putri, S. H., Nasya, A. D., & Rini, M. (2025). Penerapan e-budgeting untuk mendukung transparansi anggaran: Studi kasus Pemerintah Kota Surakarta. *ANTASENA: Governance and Innovation Journal, 3*(1), 239–252. https://doi.org/10.61332/antasena.v3i1.348

Julianty, A. F. (n.d.). *Analisis implementasi e-budgeting dalam mendukung transparansi pada Pemerintah Kota Surakarta*. Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.

Prayoga, F. M., & Yuhertiana, I. (2021). Studi literatur faktor yang mempengaruhi implementasi e-budgeting dalam sektor publik. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations), 5*(2), 68–79. https://doi.org/10.26740/jpsi.v5n2.p68-79

Azizah, A. C., Dirgantari, N., Winarni, D., Setyadi, E. J., & Wibowo, H. (2026). Pengaruh e-Simbada, e-Budgeting, dan e-Planning terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021–2023. Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi, 9(1), 380–394. https://doi.org/10.57178/paradoks.v9i1.2166